

buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



**Mendag: Pasar Lelang
Pangkas Mata Rantai
Perdagangan**

**Kredit Macet SRG
Nol Persen**

**BI Himbau BUMN
Lakukan Hedging Valas**

Era Baru Perdagangan Timah



DAFTAR ISI

Berita Utama.....4-7

- Era Baru Perdagangan Timah

Pasar Lelang.....8-9

- Mendag: Pasar Lelang Pangkas
Mata Rantai Perdagangan

Resi Gudang.....10-11

- Kredit Macet SRG Nol Persen

Berjangka.....12-13

- Satukan Persepsi e-reporting

Agenda Foto.....14-15

Aktualita.....16-17

- FSTJ Resmi Menjadi Pengelola Gudang SRG
- Produksi dan Ekspor Sawit RI 100 % Sustainable dan
Tersertifikasi
- Transaksi Valas di Indonesia Hanya US\$5 miliar per hari
- BI Himbau BUMN Lakukan Hedging Valas

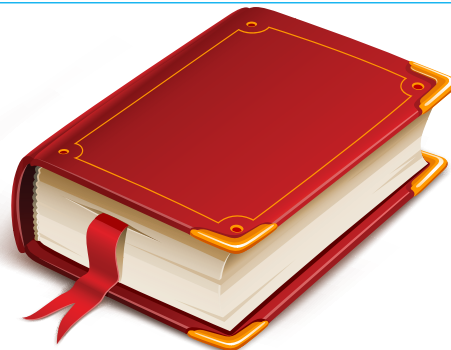
Analisa.....18

Breaking News.....19

Info SRG.....20-21

Forum...22

Mekanisme Transaksi PBK



Kolom...23-25

Perluakah Perdagangan
Derivatif Diatur Pemerintah?



Kiprah...26-27

Edukasi Via Website



Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

buletin
Bappebti
BUKTI HARGA & PERDAGANGAN KOMODITI

Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penangguna Jawab
Sutiriono Edi

Pemimpin Redaksi
Junaedi

Wakil Pemimpin Redaksi
Subagiyo

Dewan Redaksi
Natalius Nainggolan, Himawan Purwadi,
Widiastuti, Yuli Edi Subagio,
Yovian Andri, Tomi Setiawan,
Harry Prihatmoko, Poppy Juliyanti.

Sirkulasi
Apriliyanto,
Annisa Fitri Wulandari, Katimin.

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

*Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:
buletin@bappebti.go.id*



Foto : Menteri Perdagangan, M. Lutfi bersama Menteri Pertanian, Suswono mengunjungi gudang coldstorage komoditi terintegrasi di Kab. Brebes.

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) telah membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menciptakan pasar dan sekaligus produsen terbesar komoditi timah. Sejak 30 Agustus 2013 BKDI menyelenggarakan perdagangan timah melalui Bursa Timah, harga timah di dalam negeri mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata US\$ 23.175 per ton. Sedangkan sebelum beroperasinya Bursa Timah, harga timah hanya berkisar US\$ 20.000 per ton.

Implikasi positif dengan naiknya harga timah di dalam negeri menambah penerimaan negara dari royalti sektor tambang timah. Menurut perhitungan BKDI, sejak 30 Agustus 2013 hingga 30 Juni 2014, pendapatan negara dari royalti timah tercatat sebesar US\$ 4.818.021 atau setara dengan Rp 55,4 triliun (kurs Rp 11.500 per dolar Amerika).

Di sisi lain pun, kocek pelaku timah di dalam negeri semakin tebal. Setidaknya setelah Bursa Timah beroperasi, selisih harga timah berkisar US\$ 3.375 per ton. Tentunya dengan penambahan harga timah tersebut akan terjadi peningkatan pendapatan baik perusahaan smelter maupun masyarakat penambang timah yang berada di wilayah Bangka.

Dengan keberhasilan Bursa Timah menciptakan referensi harga di dalam negeri, lalu pertanyaannya adalah apa langkah selanjutnya?

Menurut penjelasan manajemen BKDI kepada Redaksi Buletin Bappebti, mengatakan, BKDI belum memiliki rencana panjang ke depan. "Sebab yang terpenting saat ini adalah menciptakan likuiditas tinggi dari para

pelaku timah. Hal itu ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah pembeli dan penjual."

"Jika likuiditas pelaku Bursa Timah sudah tinggi, baru 'lah kita memikirkan pengembangan seperti menciptakan produk derivatifnya."

Sementara itu, dari perhelatan penyelenggaraan pasar lelang bawang merah di Pasar Klampok, Brebes, Jawa Tengah, Senin 16 Juni 2014, lalu, Menteri Perdagangan, M. Lutfi, mengutarakan, stabilitas harga dan pasokan serta distribusi bawang merupakan bagian penting yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Hal itu dikatakan Mendag karena bawang merah kerap menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka inflasi.

Sebab itu, Mendag mengapresiasi pelaksanaan pasar lelang bawang di Pasar Klampok yang diinisiasi Kementerian Pertanian.

Di sisi lain, Mendag M. Lutfi, pun mengapresiasi rencana pemerintah daerah Kab. Brebes yang akan mendirikan gudang bawang di areal Pasar Klampok. Pembangunan gudang bawang yang diperkirakan menelan biaya Rp 2,5 miliar itu akan menjadi pusat perdagangan bawang secara nasional. Sebab, Kab. Brebes berkontribusi sekitar 40 % terhadap produksi bawang merah nasional.

Karena itu pula, setelah adanya koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian, pemerintah menetapkan harga referensi bawang merah sebesar Rp 24.500 per kg. Hal itu ditujukan untuk memberi peluang keuntungan baik bagi petani, pedagang maupun konsumen.

Salam!



Era Baru Perdagangan Timah

Bursa Timah BKDI telah mampu menjadi referensi harga timah dunia.

Kinerja Bursa Timah di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) mulai membuahkan hasil yang positif. Diluncurkan pada 30 Agustus 2013, Bursa Timah ini menjadi tumpuan harapan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen utama timah dunia.

"Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk dapat mengambil posisi terdepan dalam percaturan perdagangan timah internasional, yaitu melalui peningkatan daya saing timah Indonesia dengan pembentukan harga timah di bursa timah

nasional," kata Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat Gita Wirjawan, saat peluncuran Bursa Timah.

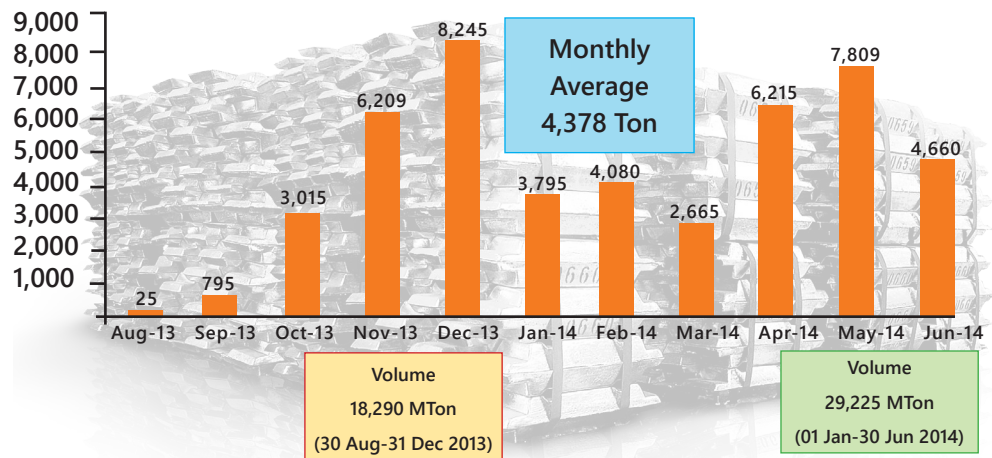
Peluncuran perdana Bursa Timah juga menandai sesi pertama perdagangan fisik timah yang hanya diikuti 12 member. Seiring berjalannya waktu, jumlah member Bursa Timah di BKDI kian bertambah dan kini menjadi 21 member. Yang lebih membanggakan, harga timah yang sempat anjlok di bawah US\$ 20.000 per ton terus merangkak naik.

Alhasil, data BKDI mencatat, pasca peluncuran pada 30 Agustus 2013 lalu,



Volume Transaksi Timah

"Kita harus turut bangga, karena Bursa Timah BKDI mulai menjadi acuan harga timah dunia, baik oleh LME maupun KLTM yang selama ini mendominasi pasar bursa pertimahan dunia"



Sumber: BKDI

harga timah di Bursa Timah BKDI selalu berada di atas harga timah di Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan London Metal Exchange (LME). Hingga 30 Juni 2013, harga timah di Bursa Timah BKDI mencapai harga rata-rata hingga US\$ 23.175 per ton. Sementara untuk harga tertingginya mencapai US\$ 23.875 per ton dan harga terendah sebesar US\$ 21.500 per ton. Bahkan, Komisaris Utama BKDI, Fenny Widjaja optimis harga timah bisa mencapai US\$ 26.000 per ton jika tidak ada kebocoran ekspor timah bentuk lainnya dari Indonesia.

"Harga timah Indonesia stabil dan menjadi referensi timah dunia sejak Agustus 2013. Berbeda pada masa sebelum adanya Bursa Timah BKDI, pada 2010 lalu timah Indonesia jadi pecundang, dimainkan pembeli luar negeri," kata Fenny, Juni 2014 lalu.

"Kita harus turut bangga, karena Bursa Timah BKDI mulai menjadi acuan harga timah dunia, baik oleh LME maupun KLTM yang selama ini mendominasi pasar bursa pertimahan dunia. Hal itu berdampak pula dengan berkembangnya industri-industri timah (smelter) lokal,"

lanjut Fenny.

Sementara itu, untuk volume transaksi timah di Bursa Timah BKDI periode 30 Agustus 2013 hingga 31 Desember 2013 mencapai 18.290 ton. Sedangkan untuk periode 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2014 mencapai 29.225 ton. Dan, total keseluruhan volume transaksi mencapai 47.515 ton.

Adapun volume ekspor timah periode 30 Agustus 2013 hingga 31 Desember 2013 mencapai 18.080 ton. Sedangkan untuk periode 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2014 mencapai 27.190 ton. Dan, total keseluruhan ekspor mencapai 45.270 ton.

Untuk negara tujuan ekspor terbesar periode September 2013 hingga 30 Juni 2014 adalah Singapura (31.905 ton), Belanda (3.865 ton), Jepang (2.790 ton), Amerika Serikat (2.690 ton), Korea (1.185 ton), dan India (1.180).

Royalti Meningkat

D i sisi lain, Fenny Widjaja menyebutkan, Bursa Timah BKDI sejak 30 Agustus 2013 hingga 30 Juni 2014 telah berkontribusi memberikan pendapatan kepada negara sebanyak US\$ 4.818.021, setara Rp 55,4 miliar

dengan kurs Rp 11.500 per dolar Amerika. Jumlah pendapatan royalti itu naik jika dibandingkan saat Bursa Timah BKDI belum berdiri.

Asumsinya, sambung Fenny, sebelum Bursa Timah BKDI berdiri, negara mendapatkan *royalty* sebanyak US\$ 593,85 per ton dan naik menjadi US\$ 695,10 per ton setelah Bursa Timah berdiri. "Jadi ada selisih keuntungan hingga US\$ 101,25 per ton untuk royalti yang diterima negara."

Hal yang sama juga dialami oleh perusahaan smelter. Sebelumnya, perusahaan smelter hanya mampu menjual timah dengan harga US\$ 19.795 per ton. Tapi setelah adanya Bursa Timah, harga timah menembus US\$ 23.175 per ton. "Selisih keuntungannya mencapai US\$ 3.375 per ton dan total hasilnya hingga US\$ 160.600.700," ujar Fenny Widjaja.

Kebijakan Kemendag

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menjadi salah satu kunci keberhasilan Bursa Timah BKDI. Terbentuknya Bursa Timah ini merupakan salah satu usaha



Komisaris Utama BKDI, Fenny Widjaja

pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai negara utama produsen dan eksportir komoditas pertambangan.

Visi dan misinya antara lain, membentuk harga timah secara transparan, meningkatkan nilai tambah timah murni yang diekspor, meningkatkan

hilirisasi industri timah dalam negeri, intensifikasi peningkatan pendapatan negara dari pembayaran iuran produksi (royalti), meniadakan/mengurangi praktek *illegal mining*, serta mendorong untuk mewujudkan pengembangan eksploitasi timah yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Proses kelahiran Bursa Timah BKDI dimulai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 78 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah. Poin penting Permendag ini di antaranya membatasi ekspor timah dengan spesifikasi mutu timah yang dapat diekspor.

Kemudian, Permendag Nomor 78 Tahun 2012 direvisi menjadi Permendag No. 32 Tahun 2013 pada 28 Juni 2013.

Poin penting Permendag tersebut di antaranya timah batangan dan timah dalam bentuk lainnya, sebelum diekspor wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah. Untuk timah batangan mulai berlaku 30 Agustus 2013, sedangkan timah dalam bentuk lainnya mulai berlaku 1 Januari 2015.

Lalu untuk teknisnya, Bappebti kemudian menerbitkan SK Kepala Bappebti No 08 Tahun 2013, tentang Penetapan PT Bursa Komoditi dan Derivatif

Indonesia sebagai Penyelenggara Bursa Timah.

Aman dan Terpercaya

Prinsip perdagangan melalui bursa adalah *free trade and fair trade*. Semua pihak (penjual dan pembeli) bebas ikut bertransaksi dan tidak ada pembatasan pihak yang bertransaksi. Transaksi juga dilakukan secara multilateral (banyak penjual dan pembeli-*many to many*), sehingga tidak ada satu pihak yang monopoli (menguasai dan mempengaruhi).

Fenny Widjaja mengatakan, penyelenggaraan Bursa Timah BKDI lebih aman dan terpercaya karena didukung oleh Lembaga Kliring sebagai lembaga penjaminan dan penyelesaian transaksi timah. Selain itu juga diperkuat oleh kelembagaan pergudangan yakni PT. Bhanda Ghara Rekso (BGR), dan lembaga surveyor yaitu PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia.

Sedangkan untuk proses transaksi timah terbagi menjadi tiga tahap. Pertama, *pre trade*. Yaitu, pembeli membeli margin ke Bursa sebagai jaminan pembelian timah. Adapun penjual menyerahkan BST ke Bursa sebagai bukti kepemilikan timah batangan akan dijual. "BST merupakan

Seller Members (Eksportir Terdaftar-Timah)

No	Seller	No	Seller
1	TIMAH (Persero) Tbk, PT	13	BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, PT
2	REFINED BANGKA TIN, PT	14	ARTHA CIPTA LANGGENG, PT
3	MITRA STANIA PRIMA, PT	15	KARIMUNMINING, PT
4	INTI STANIA PRIMA, PT	16	TININDO INTER NUSA, PT
5	PRIMA TIMAH UTAMA, PT	17	SERUMPUN SEBALAI, CV
6	EUNINDO USAHA MANDIRI, PT	18	BANGKA PUTRA KARYA, PT
7	BUKIT TIMAH, PT	19	BANGKATIN INDUSTRY, PT
8	BABEL INTI PERKASA, PT	20	WAHANA PERKIT JAYA, PT
9	UNITED SMELTING, CV	21	BILITINMAKMUR LESTARI, PT
10	SARIWIGUNA BINASENTOSA, PT	22	GITAPESONA, CV
11	DS JAYA ABADI, PT	23	PANCA MEGA PERSADA, PT
12	STANINDOINTI PERKASA, PT		

Sumber: BKDI



bukti kepemilikan timah yang dikeluarkan oleh PT BGR yang dilengkapi dengan spesifikasi mutu sesuai kontrak. Untuk sertifikat mutu dan asal usul bijih timah dikeluarkan oleh lembaga surveyor," papar Fenny.

Kedua, *trade*, yaitu masing-masing pembeli memasukkan harga beli yang diinginkan (Bid) ke sistem bursa secara *online*. Adapun penjual memasukkan harga jual yang diinginkan (*Offer*) ke sistem bursa secara *online*.

Ketiga, *post trade* yaitu, pembeli membayar pembelian timah dan menerima timah sesuai dengan alokasi transaksi bursa. "Sedangkan penjual melepaskan hak kepemilikan timah dan imbalannya mendapatkan pembayaran," tandas.

Negara Tujuan Ekspor Sep'2013-30 Jun'2014

No	Negara	Vol (MT)
1	Singapore	31,905
2	Netherlands	3,865
3	Japan	2,790
4	USA	2,690
5	Korea	1,185
6	India	1,180
7	Taiwan	790
8	Italy	395
9	China	140
10	African	125
11	Spain	75
12	Arab	55
13	Turky	50
14	Malaysia	20
15	England	5
Total		45,270

Sumber: BKDI

Buyer Members

No	Buyer	No	Buyer
1	H MONDE INC. d/a 3H CO., LTD	11	WESTIN TRADE GLOBAL LIMITED
2	DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION	12	ECO TROPICAL RESOURCES PTE LTD
3	GREAT FORCE TRADING	13	MY UNITED TRADERS PTE LTD
4	PURPLE PRODUCTS PVT LTD	14	AMALGAMATED METAL CORPORATION PLC
5	TOYOTA TSUSHO CORPORATION	15	QUANGZHOU ZHONGQUAN MINING CO., LTD
6	GOLD MATRIX RESOURCES PTE LTD	16	TCC TRADING CORPORATION
7	NOBEL RESOURCES INTERNATIONAL PTE LTD	17	LOTUS SG PTE LTD
8	COMEXINDO INTERNATIONAL	18	LOMASASTA SINGAPORE PTE LTD
9	UNI BROS METAL PTE LTD	19	YUNTINIC RESOURCES GmbH
10	INDOMETAL (LONDON) LIMITED	20	HILANDER PTE LTD

Sumber: BKDI



Menjaga stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok termasuk komoditi bawang, dimaksudkan agar konsumen dan petani dapat menikmati harga yang wajar serta tidak dirugikan dengan terjadinya fluktuasi harga.

Mendag: Pasar Lelang Pangkas Mata Rantai Perdagangan



Pasar Lelang Agro merupakan salah satu instrumen dalam menentukan harga yang transparan sehingga dapat memberikan keuntungan baik bagi petani maupun pembeli. Berdirinya pasar lelang bertujuan untuk memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan di mana pelaku usaha atau penjual dan pembeli langsung bertemu.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan, M. Lutfi saat menyaksikan pelaksanaan pasar lelang bawang di Pasar Klampok, Brebes, Jawa Tengah, Senin 16 Juni 2014. Dalam kunjungan kerja di Brebes, Mendag yang didampingi Menteri Pertanian Suswono, serta sejumlah pejabat dari dua kementerian termasuk Kepala Bappebti, Sutriyono Edi. Dalam kunjungan itu, baik Mendag M. Lutfi maupun Mentan Suswono, juga melaku-

kan peninjauan ke sentra produksi dan sortasi bawang merah di Desa Luwung Ragi.

Dalam sambutannya, Mendag lebih jauh mengatakan, dengan bertemu secara langsung di pasar lelang berarti ada transaksi yang transparansi, adil, dan wajar. Dengan demikian diharapkan akan terbentuk harga komoditas yang dijadikan sebagai harga acuan dalam perdagangan.

"Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok termasuk komoditi bawang. Semua itu dimaksudkan agar konsumen dan petani dapat menikmati harga yang wajar serta tidak dirugikan dengan terjadinya fluktuasi harga di pasar," kata Mendag.

Sebab itu, tambahnya, salah satu strategi yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga bawang yakni mengaktifkan kembali Pasar Klampok sebagai pusat distribusi bawang merah dengan menginisiasi sistem pasar lelang.

Di sisi lain dijelaskan Mendag, komoditi bawang adalah salah satu komoditas utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi, ditinjau dari sisi pemenuhan konsumsi nasional, sumber penghasilan petani, maupun potensinya sebagai penghasil devisa negara. Pemasaran produksi bawang yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik seringkali terkendala fluktuasi harga yang tinggi. Hal ini dikarenakan produksi bawang tidak dapat dilakukan sepanjang tahun dan sifat bawang yang masuk kategori komoditas tidak tahan lama.

"Karena itu, stabilitas harga dan pasokan serta distribusi bawang merupakan bagian penting yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah," papar Lutfi.

Gudang Bawang

Upaya pemerintah pusat menjaga stabilitas harga dan pasokan serta distribusi bawang, mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kab.



Brebes, yang berencana membangun gudang bawang di areal Pasar Klampok. Pembangunan gudang bawang yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 2,5 miliar itu, merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Bank Rakyat Indonesia.

"Pembangunan gudang bawang itu merupakan langkah positif dari pemerintah daerah Brebes untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bawang. Langkah ini harus kita dukung. Karena itu kami sudah menetapkan harga referensi bawang merah sebesar Rp 24.500 per kg," jelas Lutfi.

Menurut Mendag, ditetapkan harga referensi bawang merah itu sebesar Rp 24.500, untuk memberi peluang keuntungan baik bagi petani, perdagangan maupun konsumen.

"Perhitungan ditetapkan harga referensi bawang merah itu didasari berbagai faktor, seperti pengadaan bibit bawang yang masih harus diimpor," jabar Mendag M. Lutfi.

Rekomendasi

Menteri Pertanian Suswono dalam kesempatan penyelenggaraan pasar lelang bawang itu juga mengatakan, pelaksanaan pasar lelang khusus bawang merah di Brebes merupakan rekomendasi teknis dari pihaknya. Pasalnya, produksi bawang merah Brebes memegang porsi 30 % - 40 % dari produksi nasional.

Suswono menambahkan, sifat bawang yang cepat membusuk menjadikan petani di posisi lemah terhadap pedagang. "Kerap kali harga bawang hanya dihargai pedagang sekitar Rp 4.000 - Rp 6.000 per kilogram. Alasannya bermacam-macam, seperti produksi sedang melimpah."

Menurutnya, produksi bawang merah nasional mencapai 1-1,5 juta ton. Namun, menurut Mentan, produksi bawang nasional sebesar itu belum memadai untuk menutupi kebutuhan nasional per bulan yang mencapai 90.000-100.000 per bulan.

"Produksi bawang merah kita me-



Menteri Perdagangan, M. Lutfi bersama Menteri Pertanian, Suswono mengunjungi lapak bawang di Kab. Brebes.

man masih pas-pasan. Sebab itu untuk menutupi kebutuhan maka impor menjadi salah satu pertimbangan," ujar Suswono.

Terkait itu, Dirjen Hortikultura, Kementerian, Hasanuddin Ibrahim, mengatakan, setidaknya ada empat negara yang menjadi asal impor bawang merah yakni India, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tahun 2013 lalu, impor bawang merah mencapai 18.000 ton.

"Meski kita terbelang impor bawang, tetapi Indonesia juga mengeksport sebesar bawang sekitar 10.000 ton ke negara yang sama. Ekspor-impor bawang merah itu sebagai hal yang lumrah. Ketika di negara-negara itu pada musim-musim tertentu, produksinya surplus dan mereka mengeksport ke pasar kita, dan sebaliknya ketika mereka defisit maka mereka pun impor dari petani kita," papar Hasanuddin Ibrahim.

PLKA Jateng

Kegiatan pasar lelang komoditi agro (PLKA) di Jawa Tengah yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah dilakukan sejak 2003. Penyelenggaraan pasar lelang yang dibangun dan diawasi oleh Bappebti, Kemendag, itu, berada di sebanyak 13 provinsi. Masing-masing yakni Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,

Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

Secara akumulatif, transaksi yang berhasil dibukukan dari penyelenggaraan pasar lelang sejak 2003 sampai 2006 cenderung meningkat. Tahun 2013 tercatat nilai transaksi sebesar Rp 1 triliun atau naik 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 825,23 miliar. Sementara itu, Januari-April 2014 tercatat nilai transaksi sebesar Rp 258 miliar. Sedangkan bawang telah ditransaksikan pada 2014 (Januari-Mei) melalui pasar lelang dan berhasil dicatatkan dengan nilai sebesar Rp 2,785 miliar dengan volume 188 ton. Pada tahun 2013, tercatat lima jenis komoditas dengan nilai transaksi terbesar nasional yaitu beras (Rp 296,2 miliar, total volume 39.422 ton); jagung (Rp 146,2 miliar, total volume 49.931 ton); sapi (Rp 87,2 miliar, total volume 2.763 ton); kentang (Rp 45,0 miliar, total volume 7.376 ton); dan cengkeh (Rp 26,9 miliar, total volume 683 ton). Sedangkan bawang mencapai nilai transaksi sebesar Rp 6,1 miliar dengan total volume 357 ton. Pelaksanaan pasar lelang Jawa Tengah mengalami tren peningkatan dari Rp 98,7 miliar pada 2012 menjadi Rp 153,1 miliar atau naik 55,1% di 2013. Nilai transaksi pasar lelang di Jawa Tengah sampai April 2014 mencapai Rp 58,2 miliar. 



SRG harus menjadi andalan bagi petani dalam mengembangkan usaha tani. Sebab kendala utama usaha tani adalah sulitnya memperoleh pembiayaan murah.



Kredit Macet SRG Nol Persen

Bank Jabar Banten (BJB) salah satu perbankan nasional yang mendapat penugasan dari pemerintah menyalurkan pembiayaan pasca panen Sistem Resi Gudang (SRG), meyakini skema pembiayaan tersebut aman dan menjanjikan keuntungan bagi perbankan. BJB tercatat sejak tahun 2010 menyalurkan pembiayaan SRG. Dan hingga saat ini, kredit macet dari debitor atau pun petani nyaris tidak ada alias nol persen.

Demikian antara lain dikatakan Group Head Kredit Program, BJB, Haris Resmawan, saat sosialisasi SRG di Fak. Pertanian Unpad, Jatinangor, Bandung, Jawa Barat pada 26 Juni 2014. Selain Haris Resmawan sosialisasi SRG itu juga dihadiri Dekan Faperta Unpad, Sudarjat, Kepala Departemen Sosial Ekonomi Faperta Unpad, Tomy Perdana, serta Kepala Bappebti, Sutriyono Edi. Narasumber lain yang juga turut memberi materi pada sosialisasi SRG tersebut yakni Dedeng Fachroni dari PT. Pertani (Persero) dan Kabag Pengawasan SRG dan Pasar

Lelang, Bappebti, Yuli Edi Subagio.

Lebih jauh diutarakan Haris Resmawan, saat ini BJB memiliki jaringan lebih dari 1.600 *outlet* dan 62 kantor cabang di seluruh Indonesia. Dan di seluruh jaringan itu, Resi Gudang dapat dijaminkan dalam waktu tidak lebih dari 30 menit. Hal itu dikatakan penyaluran pembiayaan Resi Gudang dari BJB untuk Kelompok Tani atau Gapoktan, tidak mempersyaratkan dokumen lainnya, tambah Haris. "Sebab, ketika Resi Gudang diterbitkan oleh Pengelola Gudang, pastinya status pemilik komoditi sudah sangat jelas." "Karena itu, bagi kami- BJB, Resi Gudang merupakan surat berharga yang sangat aman, dan kami sangat berkomitmen untuk lebih aktif dalam pembiayaan SRG," ujar Haris Resmawan.

Rp 87,8 miliar

Di bagian lain pada sosialisasi SRG di hadapan civitas Unpad, Haris Resmawan, mengungkapkan, BJB hingga semester pertama tahun



Group Head Kredit Program, BJB, Haris Resmawan

2014 telah menyalurkan pembiayaan pasca panen SRG sebesar Rp 87,7 miliar. Penyaluran pembiayaan itu diterima sebanyak 860 debitur. "Penyaluran kredit Resi Gudang dari BJB untuk tahun 2014 ini cukup mengalami peningkatan signifikan sekitar 15 % dibandingkan tahun 2013. Hingga 31 Mei 2014, BJB sudah menyalurkan kredit sebesar Rp 87,7 miliar," jelas Haris.

Dikatakan Haris, dengan penyaluran kredit sebesar itu, ada sebanyak 860 debitur. Umumnya debitur penerima kredit dari BJB itu adalah petani gabah. "Bagi kami, pembiayaan SRG sangat aman karena adanya jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. Dan petani sudah bisa menerima pencairan kredit paling lambat 30 menit. Itu dikarenakan tidak diperlukan lagi persyaratan atau dokumen tambahan," ujar Haris. Dan ditambahkannya, untuk pencairan kredit SRG dari Kelompok Tani atau Gapoktan, tidak dikenakan beban biaya.

Dukungan Unpad

Dekan Faperta Unpad, Sudrajat, dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa Unpad menyambut positif diselenggarakannya sosialisasi SRG sebagai pembiayaan pasca panen di kalangan mahasiswa. Hal itu dikatakan karena kalangan mahasiswa sebelum melangkah dan mengabdikan di dunia kerja perlu mengenal berbagai instrumen yang ditujukan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas petani.

"Sosialisasi undang-undang SRG di kalangan kampus sangat bermanfaat. Dan acara seperti ini sangat langka, apa lagi terkait untuk kepentingan petani," ujar Sudrajat.

Lebih jauh diutarakan Sudrajat, saat ini mahasiswa Unpad, khususnya pada fakultas pertanian hampir 80 % mahasiswanya berasal dari keluarga petani. "Itu artinya, dengan disosialisasikan SRG di kalangan mahasiswa kami, mereka pun bisa mengenalkan SRG kepada orang



Dekan Faperta Unpad, Sudrajat

tuanya. Sehingga harapan diterbitkannya UU SRG dapat segera sampai dan dirasakan manfaatnya."

Di sisi lain dikatakan Sudrajat, pasca diselenggarakannya sosialisasi SRG pihaknya akan segera proaktif untuk membekali mahasiswa terutama yang ditugaskan mendampingi para petani dalam pengembangan usaha tani.

"Menurut saya, SRG ini harus menjadi andalan bagi petani dalam mengembangkan usaha tani. Sebab di kalangan petani kendala utama usaha tani adalah pembiayaan murah. Karena petani masih sulitnya memperoleh pembiayaan murah, sehingga mereka pun kerap terjebak pada praktik *ijon*," jelasnya.

Akibatnya, tambah Sudrajat, petani yang terbelit praktik *ijon* tidak mampu melakukan kreativitas usaha tani karena konsentrasinya hanya terfokus untuk melunasi hutangnya kepada pemilik modal. "Apalagi dengan penguasaan lahan tani yang relatif kecil, ketergantungan modal usaha tani semakin tinggi."

"Setelah pertemuan ini, saya akan berkoordinasi dengan para dosen pembimbing untuk mengarahkan mahasiswa melakukan pengkajian dan pengembangan SRG di kalangan petani.

Terutama terhadap mahasiswa yang sudah berada di tingkat akhir. Sehingga kelak mereka memasuki dunia kerja atau pun terjun langsung sebagai petani, sudah mengetahui dan memahami skema SRG," papar Sudrajat.

Optimal

Saat musim panen raya harga komoditi umumnya cenderung mengalami penurunan. Karena terdesak kebutuhan hidup dan memerlukan modal usaha untuk kelanjutan musim tanam berikutnya, petani biasanya tidak punya pilihan dengan menjual komoditi yang dimilikinya. Di samping itu, petani juga biasanya menghadapi kesulitan untuk meminjam dana dari lembaga perbankan karena tidak mempunyai jaminan. Akibatnya, petani menggadaikan atau mengijonkan komoditi yang dimiliki dengan harga jual yang rendah.

"Sebagai solusi, maka petani dapat melakukan tunda jual komoditi pada saat harga jatuh melalui mekanisme SRG. Dengan skema SRG, komoditi yang disimpan tetap menjadi milik petani dengan dibuktikan adanya penerbitan surat bukti kepemilikan penyimpanan komoditi di gudang," tutur Yuli Edi Subagio.

Dengan dokumen resi gudang, tambah Yuli Edi Subagio, petani dapat mengagukannya ke bank sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Resi gudang sendiri berarti dokumen atau surat bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Dokumen ini diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

"Saat ini komoditi yang dapat disimpan di gudang SRG adalah komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam. Karena komoditi tersebut disimpan di gudang yang telah memenuhi standar SNI, kualitas komoditi akan terjamin dan harga jualnya tetap optimal," imbuh Yuli Edi Subagio.



Satukan Persepsi e-Reporting

Bursa berjangka, lembaga kliring berjangka dan bank penyimpanan margin berkomitmen untuk memberikan laporan secara elektronik terkait posisi keuangan pelaku usaha PBK kepada otoritas.

Pelaporan keuangan secara elektronik kepada pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) masih membutuhkan proses. Kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang dikenal elektronik reporting (e-reporting) ini, tidak dapat serta merta diterapkan tanpa melihat kesiapan dari para pelaku usaha PBK. Tapi pada prinsipnya, Bappebti secara tegas akan menerapkan sistem e-reporting kepada seluruh pelaku usaha PBK meski secara bertahap.

Merujuk Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 106/Bappebti/KP/X/2013, tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan bagi Pialang Berjangka, maka setiap perusahaan pialang berjangka diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Bappebti secara elektronik melalui aplikasi e-reporting. Laporan keuangan yang disampaikan melalui elektronik itu mencakup laporan keuangan harian, bu-

lanan dan triwulan. Sedangkan laporan keuangan tahunan disampaikan secara tertulis paling lambat 90 hari setelah berakhirnya tahun laporan.

Tidak hanya perusahaan pialang saja yang diharuskan untuk melakukan pelaporan keuangan secara elektronik. Pemberlakuan SK Kepala Bappebti No. 106 Tahun 2013 ini juga memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha PBK lainnya, yakni bursa berjangka, lembaga kliring berjangka dan bank penyimpanan margin. Karena itu, Bappebti menggelar acara konsinyering e-reporting kepada pelaku usaha PBK, di Bogor, 24 Juni 2014 lalu.

"Konsinyering ini memperkenalkan dan menginformasikan kebijakan e-reporting. Latar belakang penyelenggaraannya antara lain merupakan suatu kegiatan evaluasi laporan keuangan terkait dengan pengumpulan dana nasabah" kata Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Sri Nastiti Budianti yang memimpin jalannya

konsinyering.

Peserta dalam acara ini, antara lain, Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Hartati; Kepala Biro Analisis Pasar, Bappebti, Mardjoko; serta perwakilan dari Jakarta Futures Exchange (JFX), Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (BKDI), PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), PT Identrust Security International (ISI Clearing), dan bank-bank penyimpanan dana margin.

Menurut Nastiti, dengan terbitnya SK Kepala Bappebti No. 106 Tahun 2013, maka bank penyimpanan margin juga diwajibkan menyampaikan laporan secara elektronik. Di antaranya, laporan saldo atas rekening terpisah pialang berjangka per 31 Desember, laporan mutasi atas rekening terpisah pialang berjangka secara harian, dan laporan saldo atas rekening terpisah pialang berjangka setiap akhir bulan. "Untuk bank penyimpanan margin, kami membutuhkan data pembanding terkait laporan mutasi rekening terpisah pialang berjangka," kata Nastiti.

Untuk bursa berjangka, diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dana kompensasi yang belum diaudit oleh KAP secara elektronik per semester. Sedangkan untuk lembaga kliring berjangka juga wajib menyampaikan laporan dana rekening terpisah anggota kliring yang belum diaudit oleh KAP per semester.

Sedangkan untuk laporan keuangan yang sudah diaudit KAP, bursa berjangka dan lembaga kliring harus menyampaikan laporan per tahun dalam bentuk *hard-copy*. Selain itu juga dilengkapi lampiran lainnya, yakni, daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi perdagangan serta akta perusahaan (jika ada perubahan).

Dalam diskusi konsinyering itu, para peserta aktif melakukan diskusi agar dalam teknis pelaksanaan e-reporting dapat berjalan dengan baik. Hasil kesimpulan akhir, bursa berjangka, lembaga kliring berjangka dan bank penyimpan margin siap untuk menjalankan laporan dengan aplikasi e-reporting sesuai ketentuan.

Tapi, untuk pelaksanaan teknisnya, bank penyimpan margin masih menghadapi kendala. Pasalnya, format laporan harian aplikasi e-reporting yang disediakan oleh Bappebti tidak mungkin dilakukan secara manual. "Teknis dalam laporan harian tidak mungkin dilakukan secara manual oleh SDM kami, karena kami menghindari *human error*," ujar salah satu peserta dari perwakilan bank penyimpan margin.



Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Sri Nastiti Budianti

Karena itu, Nastiti mengatakan, diperlukan sistem agar bank penyimpan margin dapat terkoneksi dengan Bappebti. "Pihak bank harus memberikan akses kepada Bappebti agar dapat melihat rekening terpisah pialang berjangka," tegasnya.

Untuk itu, pihak bank agar secepatnya menyampaikan spesifikasi sistem pelaporan yang menunjang pelaksanaan e-reporting dan Bappebti akan melakukan peyesuaian. "Nanti kita diskusikan sistemnya dalam pertemuan selanjutnya, yang tentunya masing-masing pihak diwakili oleh ahli IT-nya," ujarnya.

Di sisi lain, perwakilan dari bank juga mengharapkan agar Bappebti mengirimkan surat resmi kepada masing-masing pimpinan bank penyimpan margin untuk melaksanakan kebijakan e-reporting. "Jika sistem pelaporannya sudah disepakati dalam pertemuan berikutnya, baru Bap-

pebti akan menyampaikan surat kepada pimpinan bank," jelas Nastiti.

Hal lainnya, Direktur ISI, Nursalam, menyampaikan usulan agar pedagang sistem perdagangan alternatif (SPA) juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya.

"Usul yang baik, akan kami wajibkan nantinya. Tapi tidak sekarang, karena kami ada *timeline*-nya," jawab Nastiti.

Evaluasi

Penyampaian laporan secara periodik dari pelaku usaha pialang berjangka masih belum memenuhi harapan. Nastiti mengatakan, hasil evaluasi dari Bappebti mencatat, masih terdapat bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka yang terlambat menyampaikan laporan tahunan 2013. "Padahal seharusnya sudah kami terima pada 1 April 2014," keluhnya.

Selain itu, bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka yang telah menyampaikan laporan tahunan 2013, format laporannya belum sesuai dengan ketentuan.

Hal yang serupa juga terjadi di bank penyimpan margin. Ia mengatakan, masih ada bank margin yang juga belum menyampaikan laporan tahunan 2012 dan 2013. "Format laporan yang wajib disampaikan bank penyimpan margin hingga kini belum ditetapkan. Dan, sanksi terhadap bank penyimpan margin yang terlambat atau belum menyampaikan laporan tahunan kepada Bappebti juga belum ditetapkan," papar Nastiti.

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

1. UU No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 2011, tentang PBK, khususnya Bab VIII mengenai Pembukuan dan Pelaporan.
2. Pelaporan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 pasal 87, tentang Pembukuan dan Pembukuan.
3. Keputusan Kepala Bappebti No. 17/BAPPEBTI/KP/V/2000, tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan.
4. Keputusan Kepala Bappebti No. 35/BAPPEBTI/III/2002, tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan & Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka (LKB), Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pialang Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka & Bank;
5. Keputusan Kepala Bappebti No. 42/BAPPEBTI/KP/III/2002, tentang Perubahan Keputusan Kepala Bappebti No. 35/BAPPEBTI/KP/III/2002, tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka (LKB), Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pialang Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka & Bank.



Agenda Foto



PT Food Station Tjipinang Jaya Resmi Menjadi Pengelola Gudang



Kepala Bappebti, Sutriono Edi menyerahkan Sertifikat Persetujuan Gudang dan Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang selaku Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dwi Antono dengan disaksikan Sekretaris Bappebti, Junaedi, Selasa (6/6/2014).

Terhitung sejak diberikannya persetujuan ini, maka PT Food Station sebagai BUMD milik Provinsi DKI Jakarta telah menjadi Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang berdasarkan pada SK Persetujuan Nomor 12/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PG/06/2014.

DKI Jakarta tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk memproduksi dan memenuhi sendiri kebutuhan pangan di DKI Jakarta khususnya beras yang mencapai 3.000 ton beras per-hari. Oleh karena itu, dengan diberikannya Persetujuan Gudang SRG itu, maka PT Food Station dapat segera memanfaatkan gudang berkapasitas 15.000 ton beras yang dimilikinya di Pasar Induk Cipinang sebagai Gudang SRG.

Capacity Building Program di Bidang PBK



Kepala Bappebti, Sutriono Edi didampingi Pejabat Eselon II Bappebti menghadiri sekaligus membuka acara Capacity Building di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diselenggarakan oleh Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia di Jakarta, 18 Juni 2014. Dalam sambutannya Kepala Bappebti mengatakan agar acara yang baik ini terus-menerus dilakukan oleh BKDI karena ke depan tantangan semakin berat dalam menghadapi AEC 2015, maka dibutuhkan SDM yang handal di bidang PBK agar kita dapat berkompetisi dengan bursa-bursa lain yang ada di kawasan ASEAN.

Kegiatan Capacity Building ini diselenggarakan selama 3 hari, 18-20 Juni 2014 dengan tujuan agar Peserta Pelatihan dapat memahami lebih dalam tentang Market Fundamental dan Evolution of Regulation, Foreign Exchange Futures, Stock Index Futures Contract dan Interest Rate Futures.

Capacity Building ini menghadirkan Pembicara Mr. Kevin Baldwin yang merupakan pakar di bidang Futures dan Options dari Amerika Serikat dan memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan terhadap pialang-pialang di beberapa negara, seperti Argentina, Brasil, Jepang, Korea Selatan, India dan Rusia.



Sosialisasi SRG di Universitas Padjadjaran, Jatinangor



Kepala Bappebti, Sutiono Edi, menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG), di Auditorium Fakultas Pertanian UNPAD, Jatinangor, 26 Juni 2014.

Dia berharap agar kalangan civitas akademika Fakultas

Pertanian Universitas Padjadjaran dapat menjadikan SRG sebagai salah satu obyek penelitian untuk pengembangan dan penyempurnaan implementasi SRG di Indonesia. Selain itu, diharapkan SRG menjadi salah satu program mata kuliah pilihan terutama untuk mahasiswa tingkat akhir. "Sosialisasi SRG di kalangan akademisi sangat penting dilakukan karena para akademisi secara tidak langsung bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertanian," imbuh Sutriyono.

Dalam Kesempatan itu juga dilakukan Dialog SRG yang dilakukan di TVRI dan RRI Bandung dengan pembicara Kepala Bappebti, Sutriyono Edi didampingi Dekan Fakultas Pertanian, Sudarjat, Direktur Pemasaran PT Pertani, Dedeng Fachroni dan Perwakilan dari Bank BJB, Haris Resmawan. Dialog tersebut mengambil tema Peran Sistem Resi Gudang dalam Mengembangkan Perekonomian Daerah.

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPNS Bappebti



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI mengambil sumpah dan melantik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bappebti-Kementerian Perdagangan RI yang diselenggarakan di Gedung Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 25 Juni 2014.

Pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut dipimpin oleh Direktur Pidana Salahudin, S.H. dan disaksikan oleh Para Pejabat Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI serta dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Bappebti Sri Hariyati, Kepala Bagian Pelanggaran Transaksi Biro Hukum Bappebti Veri Angrijono, serta staf Ditjen AHU dan Biro Hukum-Bappebti yang terkait.

FSTJ Resmi Menjadi Pengelola Gudang SRG




PT Food Station Tjipinag Jaya (FSTJ) pada 17 Juni 2014, resmi memperoleh izin sebagai Pengelola Gudang dalam skema Sistem Resi Gudang (SRG) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan.

Dirut PT Food Station Tjipinag

Jaya (FSTJ), Dwi Antono, kepada Buletin Bappebti, mengatakan, pasca memperoleh izin sebagai Pengelola Gudang, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga pendukung. "Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pertemuan dengan Pusat Registrasi, asuransi dan lembaga uji

mutu beras yang berada di bawah Bulog," jelas Dwi.

Pertemuan itu, lanjutnya, untuk membahas hal-hal teknis terkait dengan Pusat Registrasi, uji mutu dan penerbitan asuransi. Setelah koordinasi tersebut, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan pihak perbankan yang sudah memiliki pengalaman di bidang SRG. "Sementara ini ada dua kemungkinan kerjasama pembiayaan, yakni BRI atau Bank Jabar Banten (BJB). Karena kebetulan dua bank itu memiliki cabang di Pasar Induk Beras Cipinang."


"Implementasi SRG di kota Jakarta ini, dalam waktu dekat harus segera terwujud. Sebab Pasar Induk Beras Cipinang merupakan salah satu barometer perdagangan beras secara nasional," pungkas Dwi Antono. 

Produksi dan Ekspor Sawit RI 100 % Sustainable dan Tersertifikasi



Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh agar produksi maupun ekspor sawit Indonesia 100 % *sustainable* dan tersertifikasi (*certified sustainable palm oil*- CSPO). Hal itu disampaikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Bachrul Chairi, di hadapan puluhan *stakeholders* pada kegiatan diplomasi perdagangan sawit di Berlin, Jerman.

"Bagi Indonesia, industri sawit sangat strategis. Hampir 20 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam industri sawit, dan di tahun 2013 memberikan kontribusi pendapatan devisa sebesar US\$ 19,1. Sehingga sawit memegang peranan penting dalam pengentasan kemiskinan," papar Bachrul.

Pentingnya produk sawit tidak hanya bagi Indonesia, tambah Bachrul, sebab sawit merupakan sumber nabati yang paling produktif untuk dunia. Pasalnya, dibandingkan dengan sumber nabati lainnya, sawit dapat menghasilkan 5-6 ton per tahun per hektar, atau lebih dari 10 kali lipat, dan hanya membutuhkan 1 % lahan dari 1,5 miliar hektar lahan pertanian untuk menyuplai 31 % kebutuhan minyak nabati dunia. 

Transaksi Valas di Indonesia Hanya US\$5 miliar per hari

Transaksi valuta asing di Indonesia tercatat paling rendah se-ASEAN, yakni hanya mencapai US\$ 5 miliar per hari. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Task Force Pendalaman Pasar Bank Indonesia, Treesna Wilda Suparyono, di Jakarta, belum lama ini.


"Nilai transaksi mata uang asing di Indonesia hanya mencapai US\$ 5 miliar, sedangkan Singapura mencapai US\$ 300 miliar, Malaysia dan Thailand sekitar US\$ 12 miliar," ujar Treesna.

Ia menambahkan, nilai transaksi mata uang asing di Indonesia itu yang berkisar US\$ 5 miliar itu didominasi untuk pembayaran utang luar negeri dan impor BBM. "Pembayaran utang luar negeri untuk impor BBM itu sekitar 70 % dilakukan oleh BUMN. Maka transaksinya pun bersifat spot."

"Itu artinya, kalau nilai tukar dolar sedang murah, maka BUMN beli dolar dan impor BBM. Sedangkan sisanya transaksi mata uang asing berbentuk forward- penyerahan kemudian," imbuh Treesna.

Padahal, rendahnya transaksi valuta asing di suatu negara, membuat transaksi pasar baik itu pasar modal maupun pasar uang rentan terhadap gejolak. "Rendahnya transaksi valuta



asing di suatu negara seperti di Indonesia membuat mata uang rupiah rentan terjadi gejolak, karena faktor ketersediaan valuta asing itu penting dan mempengaruhi naik turunnya rupiah terhadap mata uang lain termasuk dolar AS, volatilitasnya tinggi," pungkas Treesna. 

BI Himbau BUMN Lakukan Hedging Valas

Bank Indonesia (BI) menghimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan transaksi lindung nilai atau hedging. Hal itu bertujuan untuk mencegah kerugian negara.

Ketua Task Force Pendalaman Pasar Uang Bank Indonesia, Treesna W Suparyono, mengatakan, saat ini kondisi nilai tukar rupiah tidak menentu bahkan cenderung mengalami depresiasi. Pelemahan rupiah itu akan berdampak pada stabilitas kinerja BUMN, maka itu BI menghimbau agar BUMN untuk melakukan hedging.


"Fungsi utama hedging adalah membantu perusahaan BUMN agar tidak mengalami kerugian akibat pelemahan rupiah," kata Treesna, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN, Muhammad Zamkhani, mengatakan, beberapa BUMN sudah menerapkan hedging yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sektor perusahaannya.

Menurut Zamkhani, aksi lindung nilai merupakan hal yang biasa dalam dunia usaha, tidak saja swasta tetapi juga BUMN, karena dapat dijadikan sebagai instrumen untuk berjaga-jaga dalam jangka panjang terkait utang maupun fluktuasi nilai tukar. "Dari dulu BUMN boleh melakukan hedging. Yang tidak diizinkan itu adalah transaksi derivatif yang mengandung unsur spekulasi," ujarnya.

Namun saat menerapkan lindung nilai, lanjutnya, seringkali BUMN menghadapi

ketakutan akan ada kerugian bagi perusahaan sehingga tidak semua berani mengambil langkah tersebut karena jika perusahaan merugi, akan dimasukkan dalam kerugian negara.

Ia mencontohkan beberapa perusahaan di bawah kedeputiannya yang menerapkan lindung nilai yaitu sektor pertambangan yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi harga baja di pasar internasional. "Jika kurs dolar AS menguat akan menekan pendapatan karena biaya bahan baku melonjak. Sebaliknya, perusahaan agro akan meraih pendapatan meningkat jika kurs melonjak karena akan mendapat valuta asing dari hasil ekspor," ujarnya. 



Harga Karet Diprediksi Naik Imbas Musim Kering

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) memprediksi harga karet ekspor akan naik menyusul terjadinya musim kering dan naiknya harga minyak mentah di pasar internasional.

"Musim kering akan menyebabkan produksi karet di Indonesia dan negara produsen lainnya menurun, sementara naiknya minyak mentah akan mengalihkan pembelian karet sintesis ke karet alam," kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Eddy Irwansyah, di Medan, belum lama ini.

Di sisi lain, lanjut Eddy, perekonomian negara utama impor karet yakni Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat terlihat dalam tren membaik. "Pasokan yang sedikit dan sebaliknya permintaan meningkat diduga akan memicu kenaikan harga karet dan itu sangat dinanti pengusaha dan petani karet di Indonesia," katanya.

Eddy menegaskan, harga ekspor karet yang sudah jauh di bawah US\$ 2 per kg dan menyebabkan harga bahan olah karet (bokar) sekitar Rp 5.000 per kg sangat menyulitkan dan merugikan. "Mudah-mudahan harga karet bisa tergerek terus setelah beberapa hari terlihat mulai menguat," katanya.

Dia juga menyebutkan, kalau harga ekspor karet sebelumnya US\$ 1,674 per kg, maka pada posisi 13 Juni lalu sudah naik menjadi US\$ 1,680 per kg.

EL Nino Picu Produksi CPO Anjlok Hingga 55 %

Pengusaha kelapa sawit memperkirakan bahwa dampak El Nino akan menurunkan produksi kelapa sawit hingga 10 % - 55 %. Artinya, produksi CPO nasional berpotensi hilang sebesar 2,6-13 juta ton pada tahun depan.

"Bagi kebun kelapa sawit, yang berbahaya dari El Nino ini adalah *water deficit*. Kelapa sawit tidak boleh terkena cekaman kekeringan," kata Direktur Utama PTP Nusantara IV, Erwin Nasution, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Erwin menjelaskan potensi penurunan produksi tersebut bahkan lebih besar lagi di daerah seperti Lampung, yang mencapai 55 %. Dia menjabarkan, pohon kelapa sawit yang paling rentan terdampak El Nino adalah yang telah berusia di atas 10 tahun.

El Nino, katanya, tidak terlalu berdampak kepada tanaman yang masih berusia 0-10 tahun, dan hanya berpotensi mengalami kemunduran panen pertama.

Sebab itu, Erwin menyarankan kepada sesama pelaku usaha untuk segera mengantisipasi fenomena tersebut dengan melakukan kultur teknis konservasi tanah dan air. "Jadi tanaman tua tidak terlalu terdampak," ujarnya.

Produksi Kakao Cenderung Stagnan

Ketua Asosiasi Pengusaha Kakao Indonesia (Askindo) Sulsel, Yusa Rasyid Ali, mengatakan, kapasitas industri pengolahan kakao dan produksi cenderung stagnan. "Kondisi ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara importir kakao," kata Yusa, di Makassar, belum lama ini.

Ia mengatakan, sejak bea keluar kakao diterapkan pada 2010, dalam waktu dua tahun kapasitas industri sudah meningkat lebih dari 100 % atau mencapai 600.000 ton. Sayangnya, produksi kakao masih di bawah 500.000 ton. "Saat ini

produktivitas kakao di Indonesia sebesar 300 kilogram per hektare masih cukup rendah. Padahal, idealnya produktivitas kakao bisa mencapai 2 ton per hektare per tahun," katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao (Apkai), Arief Zamroni, mengatakan, target produksi biji kakao yang dipatok pemerintah sebesar lebih dari 700.000 ton akan sulit tercapai. "Saya berasumsi paling banyak 650.000 ton," ujarnya.

Dia mengungkapkan, ada 2 hal utama yang menghambat realisasi produksi

tahun ini, yaitu produktivitas areal yang rendah dan konversi tanaman. Menurut catatannya, Gernas Kakao hanya sanggup merevitalisasi 30 % dari total areal tanaman kakao nasional seluas 1,3 juta ha.

Sisanya, jelas Arief, adalah tanaman tua dengan usia di atas 25 tahun yang produktivitasnya rendah, hanya 300-400 kg per ha.

"Sebagai perbandingan, tanaman kakao muda produktif hanya bisa menghasilkan lebih dari 700 kg per ha," tandasnya. 📌



International Scale E-reporting of Futures Trading

The Futures Trading Business Financial Reporting has adopted Financial Accountancy Standard that was compiled by Indonesian Accountancy Organization. It was shown from Coftra policy that was published on Coftra Chief Regulation No.100/BAPPEBTI/PER/12/2012 on Futures Broker Accountancy Guidelines.

The publication of Coftra Chief Regulation was followed by the publication of Chairman of Coftra Decree No. 106/Bappebti/KP/X/2013 in regards to Obligation of Financial Report and Adjusted Net Capital Requirements for Futures Broker.

The core of Coftra Policy No.106 is that all futures broker company is required to submit electronic financial report on the website that was provided by the authority. The electronic financial report is consisted of daily, monthly and quarterly report. While the annual financial report is submitted in written at the latest 90 days before end of report year.

Referring to that policy, actually futures broker company financial report has been underway since 1st of April 2014. However reviewing the level of readiness from businesses Coftra has given opportunity for adaptation toward that policy. Therefore electronic financial report submission will be effectively commence on 2nd of July 2014.

"The daily electronic financial report becomes the early warning system tools for Coftra to do supervision in the middle of industrial growth complexity nowadays," Sri Nastiti explained.

Furthermore it was mentioned that the financial report preparation of those businesses has been adjusted with the Financial Accountancy Standard that was prepared by IAI with International standard reference – International Financial Reporting Standards (IFRS).

"Adopting the financial report with IFRS standard, futures trading businesses in this country will get benefits from international society as the financial report standard is implemented internationally," Sri Nastiti Budiarti said.

JFX increases the liquidity with CFD Suplemen

Jakarta Futures Exchange (JFX) on 19th of May 2014 has officially released new product after getting license from commodity futures trading authority. The new product is Contract For Difference (CFD) with total of 400 contracts.

JFX Director, Bihar Sakti Wibowo said they have been waiting for CFD license publication as the request has been submitted since last year. It was expected that this product will become the suplemen that stimulate market participants in commodity futures trading Industry.

"JFX has officially received license to trade 400 contract of CFD product on Alternate trading system scheme or also known as Bilateral Transaction. It is expected that this CFD transaction can raise JFX liquidity," Bihar said.

The reason is, as Bihar added, The alternative trading transaction in JFX has decreased during several last years. This has given negative impact to financial position of various companies.

In 2013, JFX revenue has decreased around 14 billion rupiah. Nevertheless, Bihar explained that in Annual Budgeting and Events Plan 2014, JFX has tried to do activity normally in minus financial condition. "Some factors that have caused the decreasing of alternative trading in JFX are the less supported market condition and also the trading competition," he explained.

When referring to JFX data, total volume of JFX transaction up to April 2014 is recorded for 1.074.652 lot or decreased 45.15% from 1.959.109 lot from same period last year.

From that total transaction, alternative tradings system has recorded 967,976 lot or decreased 47,74 % from same period last year that was recorded for 1.852.216 lots.

In the meantime Multilateral transaction as per April 2014 was 106.676 lot or more or less the same compared by last year record for 106.893 lot.

Cocoa duty charge elimination has not been finalized

The government plan to eliminate cocoa duty charge has not been finalized until today. "We are still reviewing, there are still pro and contra," Bayu Krisnamurthi, the Vice Minister of Trade said couple days ago.

According to Bayu the important thing that needs to be done nowadays is to improve domestic cocoa product. With High domestic product it is expected that production industry need can be fulfilled and it will be automatically pressed the cocoa bean import.

"The most important thing is to increase domestic production. The duty charge elimination will be the second importance,"

he said. However, Bayu said, after production is increased, import will still be required.

The reason is because cocoa from other countries is still required as mix ingredient to produce precise texture, flavour and fragrance. "Import is still required but we try our best to treat it as mix ingredients not basic one," Bayu explained.

The cocoa duty fee elimination discourse has been suggested since 2 months ago. In the beginning of April 2014, at that time M. Lutfi the Trading Minister has suggested the elimination of cocoa bean duty import fee 5% from previous charge. The aim is to meet local production industry need.



PENERBITAN RESI GUDANG BULAN MEI 2014

		Penerbitan				
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. PERTANI					
	- Probolinggo (Banyuanyar) *	Gabah	1	200	4.400	880.000.000
	- Probolinggo (Krasan) *	Gabah	2	257	4.400	1.130.800.000
	- Malang *	Gabah	2	70	5.000	349.000.000
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	41	485	5.775	2.802.840.000
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	24	532	5.682	3.023.000.000
	- Sidrap	Beras	2	200	6.700	1.340.000.000
		Gabah	1	78,75	4.500	354.375.000
2.	KOPERASI NIAGA MUKTI					
	- Cianjur *	Gabah	11	298	6.287	1.871.530.000
3.	PT. Pos Indonesia					
	- Tasikmalaya *	Gabah	2	20	5.000	100.000.000
4.	KSU ANNISA					
	- Subang *	Gabah	11	154	7.000	1.078.000.000
Jumlah		Gabah	82	1921	5.149	10.411.545.000
Total		Beras	2	200	6.700	1.340.000.000
			84	2.121		11.751.545.000

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN MEI 2014

		Penerbitan			Pembiayaan		
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. PERTANI						
	- Probolinggo (Banyuanyar) *	Gabah	1	880.000.000	-	-	-
	- Probolinggo (Krasan) *	Gabah	2	1.130.800.000	-	-	-
	- Malang *	Gabah	2	349.000.000	-	-	-
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	41	2.802.840.000	26	1.950.000.000	Bank BJB
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	24	3.023.000.000	5	372.800.000	Bank BJB
	- Sidrap	Beras	2	1.340.000.000	-	-	-
		Gabah	1	354.375.000	-	-	-
2.	KOPERASI NIAGA MUKTI						
	- Cianjur *	Gabah	11	1.871.530.000	13	1.309.970.000	Bank BJB
3.	PT. Pos Indonesia						
	- Tasikmalaya *	Gabah	2	100.000.000	2	70.000.000	Bank BJB
4.	KSU ANNISA						
	- Subang *	Gabah	11	1.078.000.000	8	542.000.000	Bank BJB
Jumlah		Gabah	82	10.411.545.000	44	3.632.770.000	
Total		Beras	2	1.340.000.000	0	-	
			84	11.751.545.000	44	3.632.770.000	

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG BULAN MEI 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode Mei 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi Mei 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-Mei 2014 (Rp.)
1.	Sumatera Barat	1.377.700.000	477.260.000	7.003.522.500
2.	Jambi	1.946.432.000	2.155.000.000	5.639.241.000
3.	Lampung	267.300.000	Nihil	430.100.000
4.	Jawa Barat	11.129.950.000	13.634.250.000	33.196.575.000
5.	Jawa tengah	Nihil	10.739.500.000	58.199.440.000
6.	Yogyakarta	9.396.400.000	12.099.700.000	50.582.700.000
7.	Jawa timur	7.281.250.000	33.097.000.000	92.635.650.000
8.	Bali	Nihil	10.868.000.000	0
9.	NTB	Nihil	3.586.250.000	23.663.600.000
10.	Sulawesi Utara	17.274.367.000	Nihil	30.130.667.000
11.	Sulawesi Selatan	1.820.950.000	Nihil	4.077.950.000
12.	Sulawesi Tenggara	1.675.900.000	2.780.000.000	7.285.700.000
13.	Gorontalo	754.000.000	5.847.400.000	754.000.000
14.	PT iPASAR Indonesia	65.000.000	401.198.000	130.000.000
15.	Pasar Fisik CPO	Nihil	Nihil	0
TOTAL		52.989.249.000	95.685.558.000	313.729.145.500

Sumber: Bappebti

PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT PERIODE MEI 2014

Komoditas	Penawaran Mei 2014	Transaksi Januari - Mei 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	80.000 Kg	40.000 Kg	130.000.000
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	114.000 Kg	0	0
Gondorukem	1.690 Ton	0	0
TOTAL NILAI TRANSAKSI			130.000.000

Sumber: PT iPASAR, data diolah

Mekanisme Transaksi PBK

Pengantar Redaksi:

Perubahan UU No 32 Tahun 1997, tentang perdagangan berjangka komoditi menjadi UU No. 10 Tahun 2011, antara lain membawa perubahan pada mekanisme transaksi. Jika pada undang-undang sebelumnya, transaksi para pelaku pasar hanya mengenal perdagangan multilateral berbasis komoditi. Dan perdagangan kontrak multilateral itu terjadi di dalam bursa.

Sementara itu, dengan perubahan undang-undang perdagangan berjangka para pelaku usaha dapat melakukan

perdagangan perdagangan bilateral atau juga dikenal dengan sistem perdagangan alternatif. Dengan diakomodirnya perdagangan bilateral pada UU No. 10 Tahun 2011, maka produk-produk kontrak bilateral menjadi lebih berkembang dan memiliki kekuatan hukum.

Terkait itu, mekanisme transaksi para pelaku usaha perdagangan berjangka pun semakin luas dan bursa berpotensi mengembangkan produk-produk derivatif kontrak bilateral. Dan tidak hanya itu, penawaran kontrak berjangka pun dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.





Perlukah Perdagangan Derivatif Diatur Pemerintah?

Perdagangan derivatif umumnya merupakan pasar di mana para pihak yang bertransaksi tidak terlibat secara langsung. Ada perantara yang menghubungkan para pihak tersebut, antara lain broker/ pialang maupun sistem perdagangan (trading platform). Untuk dapat berjalan secara optimal dan melindungi para pihak yang bertransaksi dibutuhkan perangkat aturan main untuk menekan terjadinya penyimpangan (fraud), baik itu berupa SOP, trading rules, spesifikasi kontrak standar, dan lain-lain. Masing-masing pasar derivatif mempunyai aturan yang spesifik, berbeda antara satu market place dengan market place lainnya. Melihat karakteristik tersebut, perlu didefinisikan sampai sejauh mana pengaturan pasar derivatif perlu dilakukan oleh pemerintah.

Perlukah perdagangan fisik diatur? Perdagangan fisik yang dimaksud di sini adalah perdagangan yang secara langsung dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi. Barang yang ditransaksikan langsung diterima oleh para pihak, demikian pula dengan pembayaran yang dilakukan. Pembeli membayarkan seluruh jumlah yang disepakati pada saat serah terima barang. Melihat sifat pasar fisik tersebut, sampai seberapa jauh otoritas berhak mengatur kegiatan yang ada di pasar fisik? Dengan mempertimbangkan potensi risiko penyimpangan dalam pasar fisik yang rendah, pengaturan dan pengawasan tidak perlu seketat di pasar derivatif.

Pasar derivatif merupakan turunan dari pasar fisik, di mana terdapat beberapa modifikasi pada pasar derivatif dari mekanisme pasar yang ditemui di pasar fisik. Modifikasi tersebut antara lain mekanisme mengenai tata cara serah terima barang, referensi harga yang digunakan, maupun persentase nilai uang yang harus diserahkan pada saat transaksi. Sebagai contoh referensi harga yang digunakan di pasar derivatif pada saat perikatan dapat berbeda dengan referensi harga yang digunakan pada saat serah terima meskipun dalam suatu transaksi yang sama.

Pada pasar fisik para pelaku pasar hanya dapat bertransaksi sebesar dana yang dimiliki. Di samping itu para pelaku

pasar dapat bertransaksi secara langsung 'cash and carry', sehingga kemungkinan untuk melakukan fraud dapat ditekan sekecil mungkin. Peran pemerintah dalam mengawasi pasar fisik sebaiknya menjaga agar informasi pasar yang dibutuhkan dapat diakses dengan baik oleh semua pihak yang bertransaksi. Di samping itu perlu diupayakan untuk menghapus hambatan perdagangan yang dapat menghambat terjadinya persaingan sehat. Dengan langkah ini diyakini pasar fisik dapat memenuhi kebutuhan dan kepastian para stakeholders.

Namun hal ini tentu berbeda dengan pasar derivatif yang lebih kompleks dibandingkan dengan pasar fisik. Perdagangan derivatif menggunakan aplikasi sistem perdagangan (*trading platform*) yang harus diakses para pelaku pasar untuk dapat bertransaksi. *Trading platform* tersebut didukung oleh aturan main (*trading rules*), di mana pada prinsipnya *trading rules* dalam perdagangan derivatif berbeda dengan pasar fisik. Di pasar derivatif *trading rules* tersebut harus dituangkan secara tertulis oleh otoritas pasar derivatif yang bersangkutan, dipahami oleh para pihak yang bertransaksi, untuk kemudian disepakati oleh para pihak yang bertransaksi. Sedangkan *trading rules* di pasar fisik tidak harus dituangkan secara tertulis, namun cukup disampaikan secara lisan atau mengikuti kaidah pasar

yang sudah dipraktekkan sejak pasar itu berdiri.

Trading platform perdagangan derivatif dewasa ini menggunakan sistem perdagangan elektronik (*electronic trading platform*). Sistem perdagangan ini jauh berbeda dibandingkan dengan sistem perdagangan yang digunakan oleh bursa derivatif yang pertama kali didirikan yaitu Chicago Board of Trade (CBOT) pada tahun 1848. Saat ini sistem perdagangan masih menggunakan mekanisme *open out cry*.

Pada prinsipnya kedua sistem perdagangan ini sama, perbedaannya terletak dari pihak yang menyepadankan order jual (*offer*) dengan order beli (*bid*). Pada sistem *open out cry*, yang menyepadankan adalah petugas yang melihat langsung aktivitas dari para pelaku pasar. Sedangkan pada *electronic trading platform*, penyepanan dilakukan sepenuhnya oleh aplikasi sistem informasi yang menggantikan peran petugas tersebut berdasarkan prosedur yang sudah disepakati. Nasabah perdagangan derivatif tidak dapat memilih sendiri lawan transaksinya, tetapi diacak oleh *trading platform*. Jadi tidak ada transaksi 'head to head', sehingga 'trust' menjadi salah satu aspek yang sangat dipertimbangkan. Khusus untuk perdagangan kontrak berjangka, diperlukan transaksi lanjutan setelah transaksi dinyatakan 'match' sampai dengan kontrak

ditutup dan para pihak dapat merealisasi keuntungan. Setelah hari perdagangan terakhir, kontrak yang belum berakhir dilanjutkan ke proses serah terima barang (*physical delivery*), di mana proses tersebut terjadi di pasar fisik. Untuk sebagian pelaku yang bermoral hazard, aplikasi sistem perdagangan tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dan merugikan pihak lain. Untuk perdagangan di bursa yang dapat diakses oleh semua pihak, maka perlu pengawasan menyeluruh dan *realtime*. Baik dari sisi transaksi (*matching engine*), pelaporan transaksi, sampai dengan proses kliring. Perlu juga diatur kriteria persyaratan bagi pihak yang dapat menyalurkan order dari pihak lain (broker/ pialang), maupun *fund manager* yang dapat menjual kombinasi beberapa jenis kontrak dalam satu paket investasi atau yang dikenal dengan istilah sentra dana berjangka (seperti reksa dana).

Prinsipnya pengaturan dan pengawasan di bursa tidak terlalu sulit karena tata cara perdagangannya sudah banyak diterapkan oleh berbagai pihak di seluruh dunia dan sudah dipraktekkan ratusan tahun yang lalu. Banyak cara untuk menghindari terjadinya *fraud* antara lain batasan volume transaksi (limit position) untuk setiap pihak yang bertransaksi dan posisi wajib lapor jika sudah memiliki posisi tertentu untuk menghindari monopoli, kartel dan pengaturan harga. Ada pula mekanisme penghentian perdagangan sementara jika terjadi kenaikan harga yang terlalu tinggi. Penghentian perdagangan tersebut dapat terjadi karena adanya kecurangan atau karena terjadinya pasar yang '*hectic*'.

Pengawasan bursa mudah dilakukan karena aplikasi perdagangan yang digunakan tidak dikuasai oleh salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi disediakan oleh pihak yang independen. Sebagai gantinya para nasabah diwajibkan membayar sejumlah *fee* untuk bursa maupun pihak yang melakukan kliring terhadap transaksi yang terjadi. Otoritas pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah jika caku-



pan pasar sudah memberikan dampak kepada perekonomian nasional. Namun hal ini berbeda untuk perdagangan derivatif yang dilakukan secara bilateral.

Perlukah pengawasan dilakukan? Beberapa efektifkah pengawasan itu dapat mencegah terjadinya *fraud*? Jika diperlukan, pihak mana yang wajib melakukan pengawasan?

Di luar negeri pengawasan perdagangan bilateral di luar bursa dapat disetarakan dengan perdagangan multilateral di bursa jika penyelenggara perdagangan tersebut menggunakan aplikasi perdagangan yang telah diotorisasi oleh pihak independen. Dengan demikian perdagangan bilateral yang antara lain dikenal dengan istilah *over the counter* (OTC) telah dijamin dan tidak dengan mudah disalahgunakan oleh pemilik sistem karena sudah disekuritisasi secara berkala oleh auditor independen. Penyelenggara sistem tidak perlu melaporkan setiap transaksi secara *realtime* kepada otoritas, dan otoritas tidak perlu mengawasi transaksi secara *realtime* karena hubungan para pihak murni berdasarkan kepercayaan. Namun ada batasan waktu paling lambat yang harus dipatuhi untuk melakukan registrasi. Meskipun demikian jika terdapat transaksi yang mencurigakan, maka otoritas pengawas dalam hal ini dapat

melakukan audit terhadap sistem perdagangan penyelenggara.

Nasabah yang tidak puas atau tertipu dapat dengan mudah menutup transaksi dan pindah ke pedagang lainnya atau dapat pula melaporkan hal tersebut kepada asosiasi dari para penyelenggara sistem bilateral tersebut atau kepada kepada otoritas pengawas. Walaupun demikian pengawasan tersebut tidak seefektif jika perdagangan tersebut dilakukan di bursa.

Pengawasan terhadap transaksi di luar bursa akan selalu tertinggal karena registrasi transaksi tidak dilakukan secara otomatis begitu transaksi tersebut disepadankan ('*matched*'). Inilah merupakan salah satu kelemahan dari perdagangan di luar bursa ditinjau dari sudut pandang nasabah. Skema seperti ini antara lain diterapkan di Amerika Serikat, Inggris dan Jepang, dan sudah berjalan baik.

Di Amerika Serikat, disamping otoritas pengawas yang ditetapkan oleh pemerintah, pengawasan dilakukan oleh pengurus yang tergabung dalam asosiasi penyelenggara sistem yang disebut National Futures Association (NFA). Pengawasan oleh asosiasi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengenaan sanksi kepada para anggota untuk mendukung transparansi dalam bertransaksi. Di negara-negara tersebut, untuk beberapa



jenis kontrak tertentu yang menggunakan skema transaksi OTC, harus dilakukan kliring ke lembaga kliring yang sudah diakreditasi oleh otoritas. Proses kliring terhadap transaksi OTC bertujuan untuk meregistrasi transaksi yang telah terjadi. Hal ini berbeda dengan perdagangan di bursa, dimana transaksi langsung tercatat dan dijamin oleh lembaga kliring yang ditunjuk secara otomatis.

Registrasi transaksi OTC ke lembaga kliring dimaksudkan untuk mengurangi adanya risiko kredit antar pihak yang bertransaksi. Di samping itu untuk mengurangi biaya administrasi dan biaya transaksi, serta meningkatkan likuiditas karena adanya kepastian semua transaksi sudah terdaftar. Para pihak dapat dengan mudah masuk maupun keluar dari sistem.

Dengan demikian mekanisme kliring di samping meningkatkan transparansi dapat pula meningkatkan likuiditas serta memudahkan pengawasan dan pengendalian risiko. Dengan adanya proses kliring terhadap transaksi OTC, pedagang yang menyelenggarakan sistem hanya mendapatkan keuntungan dari fee yang dibayarkan oleh nasabah setiap kali melakukan transaksi, dan pada hakikatnya tidak dapat melakukan *internalizing*, baik pada sistem perdagangan yang dimiliki maupun dengan penyelenggara sistem

perdagangan lainnya. Para penyelenggara sistem bilateral sangat menyadari bahwa kepercayaan perlu dijaga dan lebih bernilai dibandingkan keuntungan sesaat.

Sebagai tambahan, perlu dipahami oleh para nasabah dari penyelenggara sistem perdagangan bahwa tidak semua risiko *fraud* dapat dihindarkan dalam perdagangan di luar bursa. Selalu ada peluang sehingga otoritas pengawas tertinggal baik untuk perdagangan di bursa maupun di luar bursa. Khusus untuk perdagangan di luar bursa peluang untuk melakukan *fraud* lebih besar, mengingat proses terjadinya penyepadanan transaksi (*matching*) tidak dapat diawasi lebih dini oleh pengawas. Pada perdagangan di luar bursa, beberapa instrumen pengawasan untuk mencegah *fraud* tidak dapat dioptimalkan, seperti batas maksimum kepemilikan volume tertentu untuk mencegah pengaturan harga, dan *early warning system* untuk mencegah pengaturan transaksi (*bucketing, pre-arranged trading*). Hal ini antara lain dikarenakan dalam sistem perdagangan di luar bursa umumnya semua nasabah bertransaksi melawan pihak yang sama, sehingga tidak ada batas maksimum bagi pedagang tersebut untuk menguasai posisi tertentu.

Meskipun sudah ada aturan yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi untuk mencegah kurang optimalnya pengawasan pada perdagangan di luar bursa, namun para nasabah perlu diberikan informasi yang cukup untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum memulai transaksi.

Melihat uraian di atas, perdagangan kontrak derivatif di Indonesia perlu mendapat pengaturan yang lebih komprehensif, baik untuk perdagangan kontrak berjangka di bursa maupun kontrak gulir (CFD) yang dilakukan di luar bursa (OTC). Pengawasan tidak perlu terlalu ketat sehingga menghambat kreativitas, tidak pula terlalu berlebihan karena dapat menimbulkan pemborosan. Nasabah yang diajak untuk bertransaksi kontrak

derivatif seharusnya adalah nasabah yang sudah benar-benar memahami mekanisme transaksi dan risiko yang akan dihadapi. Nasabah tidak boleh diiming-imingi dengan keuntungan yang besar tanpa menyampaikan adanya risiko yang sama besarnya untuk mengalami kerugian. Dengan diterapkannya prinsip *know your customer*, diharapkan *fraud* dalam transaksi derivatif dapat ditekan serendah mungkin.

Akan lebih baik jika pengawasan kontrak derivatif dilakukan secara integral dengan pengawas lembaga keuangan lainnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Khusus untuk kontrak derivatif valuta asing, Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga perlu dilibatkan. Selama ini pengawasan perdagangan valuta asing, baik untuk kegiatan penukaran maupun untuk tujuan hedging dilakukan oleh Bank Indonesia. Adapun objek pengawasan untuk kegiatan ini adalah Bank dan Non Bank antara lain Pedagang Valuta Asing (PVA). Bank Indonesia hanya mengizinkan institusi tersebut untuk melakukan lindung nilai dengan menggunakan instrumen kontrak forward. Sedangkan untuk instrumen lainnya seperti kontrak berjangka dan kontrak gulir, Bank Indonesia masih melarang untuk melibatkan bank dan PVA. Pengaturan selama ini dilakukan oleh BAPPEBTI tetapi hanya diperkenankan untuk institusi di luar bank dan PVA. Dengan demikian kedua institusi tersebut tidak dapat melakukan transaksi kontrak berjangka baik untuk dirinya maupun untuk nasabahnya meskipun untuk tujuan hedging.

Sementara itu dengan meningkatnya rasio hutang Indonesia yang menggunakan valuta asing maka variasi instrumen hedging sangat dibutuhkan. Pembatasan pelaku usaha di bidang ini pada akhirnya mengakibatkan perkembangan perdagangan derivatif khususnya kontrak valas berjalan lambat dan kurang inovatif meskipun cukup potensial untuk dikembangkan dan memberikan manfaat yang cukup signifikan. (*) **Nurlisa Arfani** (Calon Widyaiswara, Pusdiklat Kemendag.



Edukasi Via Website

Indra Firmansyah

Sosialisasi dan edukasi memerlukan biaya yang mahal jika dibandingkan dengan biaya operasional lainnya. Karena itu, PT Central Capital Futures (CCF) merintis sarana yang lebih murah, efektif dan efisien.

Industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dapat berkembang dengan pesat jika didukung oleh faktor sosialisasi dan edukasi yang maksimal. Berangkat dari spirit tersebut, Direktur PT Central Capital Futures (CCF), Indra Firmansyah, bilang, CCF akan menerapkan sebuah sistem yang dinamakan *Integrated Client Support-ICS* untuk melakukan sosialisasi dan edukasi perdagangan berjangka kepada masyarakat.

ICS merupakan sebuah sistem berbasis online yang akan membantu nasabah maupun calon nasabah. Jadi, jelas Indra, website CCF nantinya akan dikelola menjadi pusat informasi bagi masyarakat yang mencari informasi dan belajar tentang perdagangan berjangka melalui sistem online.

"Untuk tujuan itu, kami membangun

satu divisi dalam sistem ini. Di tim ini ada programmer, webdesainer, sales online, analis dan lainnya," terang Indra Firmansyah yang akrab disapa Indra, kepada Buletin Bappebti, di kantor CCF, Jakarta, Juni 2014, lalu.

Menurut Indra, sistem ini menjadi senjata yang canggih dan modern untuk *mensupport* tenaga marketing. "Melalui ICS kami mencoba untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, dan karena itu tenaga marketing tidak perlukan lagi untuk menjelaskan dengan brosur ataupun paper. Sebab, semua sudah terbantu dengan sistem online yang dapat diakses melalui semua jenis gadget."

Tak hanya itu, ICS juga bertujuan mendampingi para nasabah CCF. Dengan demikian, sistem ini dapat bermanfaat untuk calon nasabah

yang ingin mengenal perdagangan berjangka dan juga nasabah yang sudah berinvestasi. "Dari yang baru mulai mencari informasi, baru belajar, sampai naik ke tingkat simulasi, registrasi dan investasi. Setelah nasabah berinvestasi pun kami tetap mendampingi mereka melalui sistem ini, karena kami pun menyediakan informasi analisa komoditi yang dibutuhkan mereka," jelas ayah dari dua orang putri ini.

Website CCF juga menampilkan edukasi yang melingkupi e-learning, kelas training, lokakarya, seminar, webinar. Menurutnya, edukasi tersebut dapat dinikmati masyarakat tanpa harus datang ke kantor CCF. Pasalnya, website CCF menampilkan layanan *live streaming* yang dapat diakses bagi masyarakat luas.

"Dengan bermodal koneksi internet, masyarakat dapat melihat langsung tayangan seminar tersebut. Mereka dapat melihat presentasi dengan jelas dan dapat mendengarkan pembicaraan dengan baik," katanya.

Selain itu, CCF juga menyiapkan fitur *online chat* marketing dan *online chat* analis. Hal itu untuk memudahkan calon nasabah dan nasabah yang memiliki pertanyaan seputar perdagangan berjangka, tambahanya.

Pioner

Untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, menurut Indra, perusahaan pialang tidak serta merta harus membuka kantor cabangnya di seluruh daerah. Meskipun, pembukaan kantor cabang menjadi cara utama dalam mendekatkan diri dengan para nasabah. "Banyak yang harus dipertimbangkan untuk membuka kantor cabang di daerah, misalnya, kami harus memikirkan potensi ekonomi masyarakat di sana dan dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk membuka kantor cabang."

Karena itu, Indra berpendapat, ICS menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Indra optimis sistem online ini menjadi salah satu sarana sosialisasi dan edukasi

yang murah, efektif dan efisien. "Sistem ini dapat menghilangkan keterbatasan jarak, waktu, tempat dan biaya."

Apalagi, sambung Alumni Fak. Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2006 ini, CCF yang merupakan member Jakarta Futures Exchange (JFX) menjadi pioner dalam mengembangkan *Integrated client support*. "Semua perusahaan pialang memiliki website. Tapi saya yakin saat ini baru CCF yang mengelola website-nya hingga menjadi *Integrated client support*."

"Memang ini butuh waktu, tapi kami yakin, tiga bulan mendatang, sistem ini sudah mendekati sempurna," sambungnya.

Di sisi lain, CCF juga saat ini sedang mengajukan izin penerimaan registrasi nasabah secara elektronik (*online registration*) kepada Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Nantinya, calon nasabah CCF dapat melakukan registrasi langsung melalui website CCF tanpa harus menandatangani *letter agreement* (surat perjanjian).

"Jadi jika surat izin *online registration* sudah keluar dari Bappebti, nasabah cukup dengan jarinya saja sudah dapat berinvestasi. Dan nasabah tidak perlu lagi tanda tangan di surat perjanjian yang berlembar-lembar," terang Indra.

Target

Dari kacamata pria kelahiran Jakarta, 1978 ini, cenderung negatifnya citra industri PBK di masyarakat lantaran nasabah tidak mendapatkan informasi yang maksimal. Sehingga, banyak nasabah dalam melakukan transaksi menggunakan jasa orang lain, dan mungkin saja dalam proses pelaporannya menjadi tidak benar. "Hal itulah yang membuat masalah di kemudian hari."

Karenanya, target diluncurkannya



Integrated client support bertujuan agar citra positif industri PBK di Indonesia tidak tercoreng. Jika sistem ini berjalan dengan baik, maka nasabah dapat mencari informasi dengan mudah, jelas dan detail.

"Motivasi kami adalah membangun bisnis yang futuristik. Jadi nasabah bisa untung ya karena kemampuan analisisnya, walaupun rugi, dia sadar karena kesalahan analisisnya, bukan karena faktor-faktor lain," lanjut Indra yang telah mengawali karirnya di industri PBK sejak tahun 2000 silam.

Indra juga tak menampik dengan ICS pihaknya sangat berharap volume transaksi di CCF meningkat, dan mampu menjadi perusahaan pialang terdepan yang masuk daftar 5 besar pialang di Indonesia. Kendati demikian, kata Indra, jika perusahaan pialang hanya memikirkan "volume lot-nya" saja, suatu saat pasti akan ditinggalkan nasabah yang tidak puas dengan pelayanan perusahaan.

"Bisnis ini bisa besar bila dikembangkan dengan faktor edukasi. Jika ini dikejar, saya yakin nasabah akan datang dengan sendirinya," tandas Indra Firmansyah.

BIJAK BERINVESTASI

Pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan

Pelajari wakil pialang yang mendapat izin dari Bappebti

Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi

Pelajari risiko yang dihadapi

Pelajari kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan

Pelajari dokumen-dokumen perjanjian

Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda berinteraksi



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Bappebti
www.bappebti.go.id